

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS DESA SUNGAI PANDAN HULU KECAMATAN
SUNGAI PANDAN)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH:

HATA

NPM: 2022127

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

2026

TANDA PERSETUJUAN

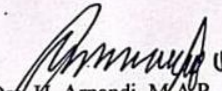
Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : Hata
NPM : 2022127
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan).

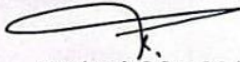
Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing Skripsi pada program studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai,

Amuntai, 8 April 2026

Pembimbing 1


Drs. H. Arpandi, M.A.P.
NPUTK. 8553741642130083

Pembimbing 2


Nasripani, S.Sos, M.A
NPUTK. 9054749650130093



Program Studi Administrasi Publik

Amad Baihaqi, S.Sos, M.A
NPUTK. 2436770671130263

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, Tuhan semesta alam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA SUNGAI PANDAN HULU KECAMATAN SUNGAI PANDAN)”**. Adapun proposal ini dibuat sebagai syarat pengajuan penelitian agar selanjutnya dapat diselesaikan menjadi sebuah skripsi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP., CIQnr.,CIQaR., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi S.Sos, M.A Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. H. Arpandi, M.A.P. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Nasripani, S.Sos, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada dua Orang tua dan keluarga, terimakasih atas dukungan dan motivasi serta do'a nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal yang baik dan mendapat ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti miliki, namun peneliti berharap semoga hasil penulisan proposal skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada pembacanya.

Amuntai, 20 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Berpikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Tipe Penelitian	24
D. Data dan Sumber Data	25
E. Desain Operasional	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	31
H. Uji Kredibilitas Data	34
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	27
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	23
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling nyata dan berkelanjutan adalah persoalan sampah. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, khususnya sampah rumah tangga, terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila tidak dikelola secara tepat, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, menurunnya kualitas lingkungan, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Indonesia masih menghadapi persoalan persampahan yang kompleks, mulai dari timbulan yang terus meningkat, rendahnya pengurangan di sumber, hingga ketergantungan pada TPA terbuka di banyak daerah. Data dan publikasi yang merujuk pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa capaian pengelolaan nasional belum merata, sehingga pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir belum mampu mengejar laju timbulan sampah rumah tangga. Situasi ini ditegaskan dalam berbagai rilis dan telah merujuk SIPSN pada 2025, yang menekankan perlunya penguatan peran masyarakat sebagai garda depan pengurangan sampah dari sumbernya.

Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menghadapi tantangan serupa. Dokumen perencanaan/ lingkungan daerah

menyoroti bahwa pengelolaan sampah berbasis rumah tangga perlu terus ditingkatkan agar dampak lingkungan dan sosialnya dapat ditekan. Pemerintah daerah juga tengah menyusun arah kebijakan lima tahunan (RPJMD 2025–2029) yang menekankan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan program prioritas, termasuk isu persampahan.

Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu desa yang menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil pengamatan awal, terlihat bahwa Implementasi Peraturan Bupati dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah Implementasi Peraturan Bupati HSU Nomor 74 Tahun 2018 belum optimal, terutama pada aspek pengurangan sampah (*reduce, reuse, recycle*) yang tidak berjalan efektif. Masyarakat masih bergantung pada barang sekali pakai, tidak melakukan pemilahan sampah, dan fasilitas pendukung seperti bank sampah atau TPS 3R belum tersedia memadai.

Pada aspek penanganan sampah, proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan tidak berjalan baik. Semua sampah tercampur, fasilitas pengolahan tidak ada, dan TPA masih menggunakan metode *open dumping* sehingga menimbulkan pencemaran.

Selain itu, strategi pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan pemerintah tidak terlaksana optimal akibat kurangnya edukasi masyarakat, serta koordinasi dan penegakan hukum yang belum efektif.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Struktur permukiman desa yang banyak memiliki gang-gang kecil dan rumah-rumah yang masuk ke dalam menyebabkan penyediaan tempat sampah tidak merata. Tempat sampah umumnya hanya tersedia di pinggir jalan raya, sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari akses tersebut. Akibatnya, sampah rumah tangga sering ditumpuk di beberapa titik yang berbeda tanpa pengelolaan yang memadai, yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan fenomena masalah yang terjadi di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tidak terlaksana secara efektif yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, hal ini berkaitan dengan komitmen pelaksana dalam bertanggung jawab atas tugasnya.
2. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari perangkat atau instansi lingkungan menjadi penyebab utama masyarakat belum memahami skema pemilahan sampah dari sumbernya. Dalam aspek komunikasi, muncul hambatan pada tiga dimensinya, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah petugas atau kader lingkungan yang bertugas memberikan edukasi masih sangat terbatas sehingga tidak mampu menjangkau seluruh

wilayah atau kelompok masyarakat. Akibatnya, informasi mengenai penerapan prinsip 3R tidak pernah tersampaikan kepada warga karena proses transmisi pesan dari perangkat desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Tidak adanya SOP atau mekanisme sanksi yang jelas dalam struktur birokrasi membuat penerapan 3R tidak memiliki dorongan yang kuat bagi masyarakat. Karena tidak ada aturan operasional yang tegas. Baik berupa prosedur, pengawasan, maupun konsekuensi. Warga tetap membuang sampah secara campuran tanpa perubahan perilaku. Ketiadaan SOP ini menunjukkan lemahnya struktur birokrasi dalam mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan pengurangan sampah di tingkat desa.
4. Kurangnya fasilitas tempat sampah yang disediakan oleh desa menyebabkan masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai untuk memilah atau membuang sampah dengan benar. Keterbatasan fasilitas ini berakibat pada penumpukan sampah di beberapa titik, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan dan penanganan sampah terhambat oleh minimnya dukungan fasilitas dasar.
5. Tidak adanya SDM yang bertugas memantau perilaku pembuangan sampah warga seperti pemilahan, kepatuhan terhadap jadwal, maupun pembuangan liar menyebabkan berbagai pelanggaran sering terjadi dan tidak terkendali. Ketiadaan petugas yang mengawasi membuat masyarakat cenderung abai

terhadap aturan, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan sesuai ketentuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama disebabkan oleh ketidakefektifan implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan).

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Penelitian dilakukan pada Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam hal ini fokus penelitian menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2022: 154-158):

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi/ Sikap
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan).

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menmenjadi media untuk mengembangkan pemahaman, penalaran, dan wawasan mengenai ilmu Administrasi Publik dalam hal ini yaitu kebijakan publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam membantu peneliti memahami pengetahuan yang telah ada dalam bidang yang diteliti, mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu diisi, dan menunjukkan orisinalitas penelitian baru yang akan dilakukan. Sebelum menyusun penelitian ini, peneliti telah mempelajari beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini nantinya.

1. Muhammad Risman Wahyudi, 2022, **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG (Studi Kasus Desa Karang Putih dan Kelurahan Pulau)**, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif *study* kasus. Penelitian menyimpulkan sesuai variabel Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn sudah baik, yaitu sub variabel: kebijakan standar dan sasaran kebijakan serta ukuran standar dan sasaran kebijakan sudah tersedia; etos kerja dalam pelaksanaannya sudah baik; dana/ anggaran sudah tersedia dan direalisasikan sesuai perencanaan; terdapat dukungan dan koordinasi

dengan instansi lain; kompetensi, dukungan elit politik dan kondisi sosial sudah baik, beragam serta mendukung; kondisi ekonomi sudah mendukung dan ada partisipasi aktif masyarakat membayar iuran sampah; kondisi politik, kepuasan pelaksana, saran pelaksana dan kepuasan masyarakat mengenai kebijakan sudah baik serta mendukung; dan terdapat saran masyarakat mengenai kebijakan yang mendukung implementasi pengelolaan sampah. Faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya kuantitas sumber daya manusia, kurangnya sarana pengelolaan sampah dan tanggapan masyarakat terkait sosialisasi produk hukum berupa implementasi pengelolaan sampah kepada masyarakat belum cukup ideal. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan kuantitas sumber daya manusia pengelola sampah, peningkatan anggaran dan membuat program sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat/komunitas.

2. **Muhamad Yusuf, 2023, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR.** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pematang Karau sudah optimal. Hal ini dilihat dari indikator yang sudah optimal dan kurang optimal yaitu terdiri dari sarana dan prasarana yang dipakai seperti mobil *pick up*, daya dukung masyarakat, koordinasi antar organisasi sudah terjalin dengan baik, tanpa ada campur tangan politik dalam kebijakan pengelolaan sampah. Kemudian terdapat

indikator yang kurang optimal yaitu dari segi pengangkutan sampah yang hanya dilakukan sekali dalam seminggu sehingga terjadinya penumpukan sampah yang ada dibak sampah. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor penghambat yakni kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan masih menggunakan metode *open dumping*. Faktor pendorong yakni adanya mobil untuk mengangkut sampah dan kebersihan lingkungan sekitar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *Webster* (Sahya Anggara, 2018: 232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Van Horn (Sahya Anggara, 2018: 232), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Menurut Dye (Leo Agustino, 2022:14) kebijakan publik: "... *what governments do, why they do it, and what difference it makes*". Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*).

Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye (Leo Agustino, 2022:14) menulis pula kebijakan publik sebagai: "*Anything a government chooses to do or not to do.*" Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Jadi dapat disimpulkan kebijakan publik adalah segala tindakan maupun keputusan pemerintah, baik melakukan sesuatu maupun memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu dan menghasilkan dampak bagi masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implemetasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*).

Van Meter dan Van Horn (Joko Pramono, 2020:3) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya ada model-model implementasi kebijakan publik, yaitu

a. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

George C. Edward III (Leo Agustino, 2022: 154-158) model implementasi yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implemetasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

a) Transmisi

Adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transisi ini yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksana kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c) Konsisten

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Hal ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

- 2) Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencangkupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya.

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:

- (1) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan.
- (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pada terhadap hukum.

c) Wewenang

Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakanyang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

- 3) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

a) Efek disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b) Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*)

Dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam konteks birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada “pembentukan” *system* pelayanan *public* yang optimis, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

c) Insentif

Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah

dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

- 4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang dan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

a) Membuat *Standar Operating Procedures* (SOP)

Adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

b) Melaksanakan fragmentasi

Tujuan untuk menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

b. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Leo Agustino, 2020:159) Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih).

c. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul A.

Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Joko Pramono, 2020:7-8) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute*

to structure implementation) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

d. Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Leo Agustino, 2022:150-151) disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan publik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

4. Pengelolaan

Pengertian Pengelolaan, Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka disimpulkan pengelolaan itu adalah pengadministrasian pengaturan atau penataan suatu kegiatan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Banyak didefinisikan oleh para ahli tentang pengelolaan. Terry (Jusmawati, 2018:37) mengartikan pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Jhon D. Millet (Jusmawati, 2018:37) Pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

5. Sampah

Selama ini manusia menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan dianggap tidak berguna lagi, tanpa menyadari potensi nilainya untuk didaur ulang atau diolah menjadi sumber daya baru.

Menurut Kamus Besar Indonesia (Hendra Gunawan, dkk, 2017:22) sampah adalah kotoran, sesuatu yang tak terpakai dan dibuang, semua barang yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.

Menurut Murtadho dan sa'id (Hendra Gunawan, dkk, 2017:22) Sampah merupakan suatu bahan yang terbangun atau dibuang dari sumber suatu aktivitas manusia maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai arti ekonomi, bahkan bernilai ekonomi negatif.

6. Pengelolaan Sampah

Menurut UU No.18 tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek nonteknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut. Upaya pengurangan dan penanganan sampah, pemerintah menjadikan konsep 3R sebagai dasar penanganan sampah menurut UU-18/2008. 3R adalah *Reduce* (pembatasan) *Reuse* (guna-ulang) & *Recycle* (daur-ulang).

a. Jenis-jenis sampah

Berdasarkan bentuknya sampah dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu : sampah padat, sampah cair dan sampah gas. Jenis sampah padat berdasarkan zat asal yang dikandungnya dibagi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang

berasal dari benda-benda atau makhluk hidup, contohnya: guguran dedaunan, sisa buah, sisa sayuran dan lain sebagainya. Sampah organik sifatnya mudah hancur dan mudah diolah. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda atau zat-zat mati. Misalnya: besi, kaca, kaleng, plastik, dan lain-lain. Sampah anorganik sifatnya sulit hancur dan sulit diolah.

b. Pengolahan Sampah

Sampah organik berasal dari tumbuhan sehingga dapat dimanfaatkan untuk:

- 1) Makanan ternak: sampah yang telah dipilah ada yang dapat digunakan untuk makanan ternak seperti kambing, sapi, ayam, itik, bebek, kelinci dan hewan ternak lainnya.
- 2) Kompos: Pupuk kompos memberikan banyak keuntungan, antara lain: secara ekologis tidak merusak lingkungan, bahan yang tersedia melimpah, mudah membuatnya dan tidak memerlukan peralatan mahal untuk membuatnya dan unsur hara yang terkandung di dalamnya lebih tahan lama dibandingkan pupuk buatan.

Untuk pengolahan sampah anorganik dapat dilakukan proses:

- 1) Daur ulang: beberapa jenis sampah yang kita anggap tidak berguna, sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kejelian dalam memilah-milah sampah menjadikan berbagai sampah anorganik seperti: botol,

kaleng, plastik, kertas, karton dan aneka sampah lainnya memungkinkan untuk dimanfaatkan ulang atau didaur ulang.

- 2) Dijual: Berbagai sampah lainnya dapat dijual ke pasar loak, untuk selanjutnya diolah kembali

c. Daur Ulang Sampah

1) Sampah Organik

Bila kita sadari, sampah sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Selama masih ada manusia dan makhluk hidup lain, akan selalu menghasilkan sampah. Dalam lingkaran kehidupan, sampah adalah tahapan penting bagi kehidupan makhluk lainnya. Sampah organik menghidupkan bakteri, lalu bakteri menyuburkan tanah dan sangat bermanfaat bagi tanaman, yang akhirnya tanaman dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Sampah bukan lagi sesuatu yang harus dihindari.

2) Sampah Anorganik

Mendaur ulang sampah kertas tidaklah sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. Saat ini beragam hasil daur ulang kertas dapat dibentuk sesuai selera, bahkan seringkali dijadikan souvenir. Umumnya yang sering kita lihat berupa kotak pensil, kartu, *block note*, kotak persiapan dan lain sebagainya. Membersihkan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti mendaur ulang sampah kertas. Kegiatan ini tak sekedar menjadikan

lingkungan hidup menjadi bersih, namun juga dapat mendatangkan pendapatan.

7. Sampah Rumah Tangga

Menurut Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 (Gusman Arsyad, dkk, 2024:152) Pengertian Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sedangkan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

C. Kerangka Berpikir

Setiap kegiatan penelitian ilmiah, harus dilandasi oleh kerangka pemikiran agar penelitian dan penulisan laporan penelitian dapat tersusun secara sistematis. Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah bahwa implementasi sangat perlu dalam melaksanakan kebijakan untuk keterlibatan masyarakat dalam menunjang kebijakan publik.

Kondisi wilayah Desa Sungai Pandan Hulu terbelah rendah dalam hal pengelolaan sampah, terlebih lagi semakin meningkatnya timbulan sampah setiap hari, masalah yang terjadi dalam hal pengelolaan sampah di Desa Sungai Pandan Hulu, yaitu:

1. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tidak terlaksana secara efektif yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, hal ini berkaitan dengan komitmen pelaksana dalam bertanggung jawab atas tugasnya.
2. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari perangkat atau instansi lingkungan menjadi penyebab utama masyarakat belum memahami

skema pemilahan sampah dari sumbernya. Dalam aspek komunikasi, muncul hambatan pada tiga dimensinya, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah petugas atau kader lingkungan yang bertugas memberikan edukasi masih sangat terbatas sehingga tidak mampu menjangkau seluruh wilayah atau kelompok masyarakat. Akibatnya, informasi mengenai penerapan prinsip 3R tidak pernah tersampaikan kepada warga karena proses transmisi pesan dari perangkat desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Tidak adanya SOP atau mekanisme sanksi yang jelas dalam struktur birokrasi membuat penerapan 3R tidak memiliki dorongan yang kuat bagi masyarakat. Karena tidak ada aturan operasional yang tegas. Baik berupa prosedur, pengawasan, maupun konsekuensi. Warga tetap membuang sampah secara campuran tanpa perubahan perilaku. Ketiadaan SOP ini menunjukkan lemahnya struktur birokrasi dalam mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan pengurangan sampah di tingkat desa.
4. Kurangnya fasilitas tempat sampah yang disediakan oleh desa menyebabkan masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai untuk memilah atau membuang sampah dengan benar. Keterbatasan fasilitas ini berakibat pada penumpukan sampah di beberapa titik, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa

upaya pengurangan dan penanganan sampah terhambat oleh minimnya dukungan fasilitas dasar.

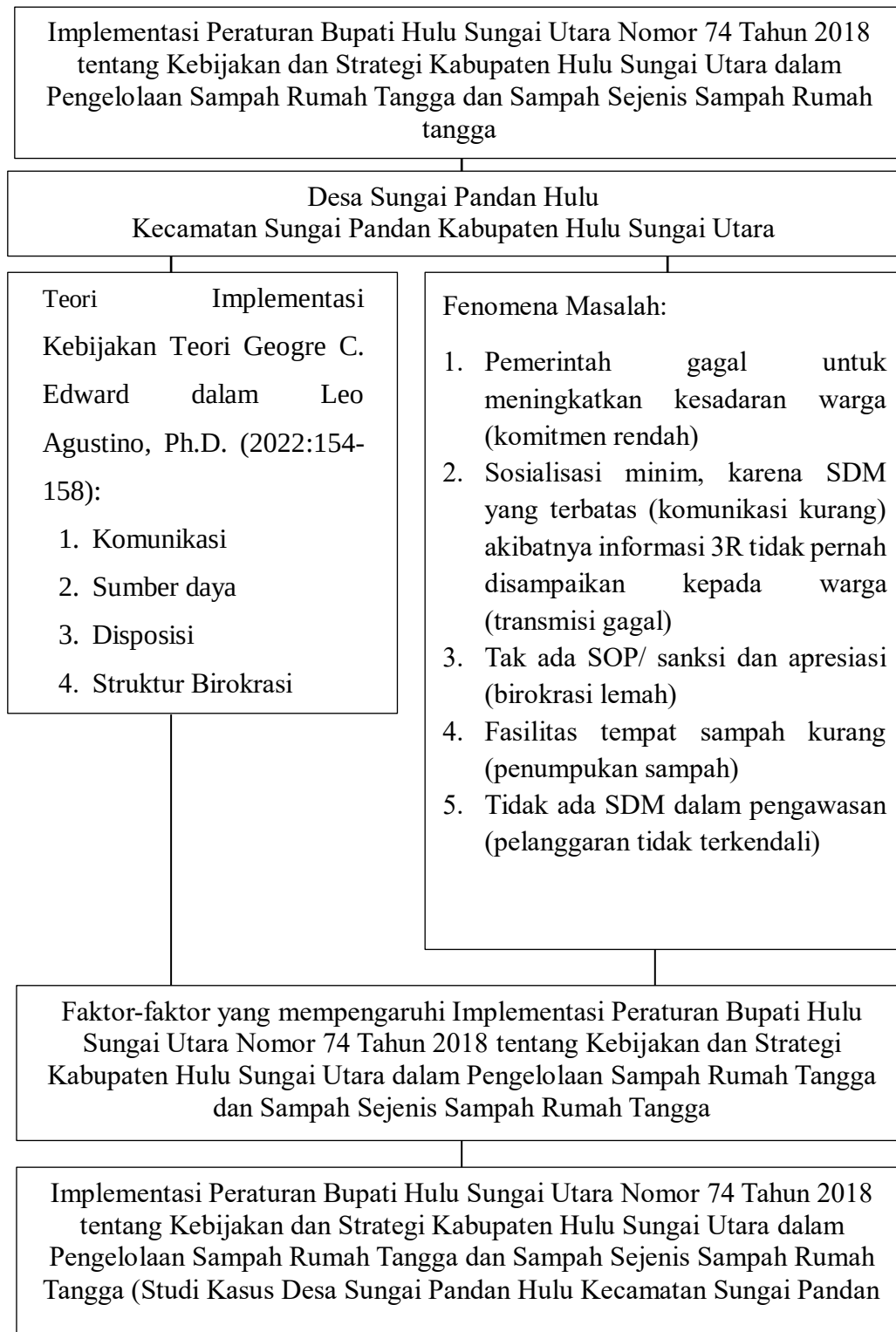
5. Tidak adanya SDM yang bertugas memantau perilaku pembuangan sampah warga seperti pemilahan, kepatuhan terhadap jadwal, maupun pembuangan liar menyebabkan berbagai pelanggaran sering terjadi dan tidak terkendali. Ketiadaan petugas yang mengawasi membuat masyarakat cenderung abai terhadap aturan, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan sesuai ketentuan yang diharapkan.

Dalam hal ini fokus penelitian mengambil teori tentang Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III (Leo Agustino, 2022: 154-158):

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/ Sikap
4. Struktur Birokrasi

Berikut ini alur dari penelitian, dan bisa dilihat pada gambar 2.2 kerangka pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian yang digunakan penulis adalah pada wilayah Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut banyak tempat timbulan sampah, dengan begitu dapat memudahkan penulis untuk terjun langsung ke lapangan mengadakan observasi dan penggalan data.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk mengungkapkan proses terjadinya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan dan menguraikan mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan.

Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan.

Menurut Danin (Ismail Suardi Wekke, dkk, 2019:34), penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial. Dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan penelitian deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang akan cermati.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai data utama (primer), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah proses penelitian. Artinya, hanya dengan

didapatkannya data tersebut sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil dikerjakan. Dari data itulah pertanyaan utama penelitian dapat dijawab. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detil, mendalam dan rinci. Data yang memiliki karakteristik seperti inilah yang biasa disebut dengan data utama atau primer (Sapto Haryoko, 2020:122). Bungin (Sapto Haryoko, 2020:122) mendefinisikan bahwa data primer adalah merupakan data yang diambil dari sumber utama atau sumber pertama di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini peneliti tidak bertindak langsung memperoleh data dari sumbernya, tetapi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

Data sekunder menurut Ibrahim, (Sapto Haryoko, 2020:122) adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer.

Data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan secara luas substansi terdalam dan informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau yang diteliti. Sebagai data pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, dibutuhkan sumber data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder. Dikatakan data primer, jika data tersebut diperoleh dari sumber asli/sumber pertama; sedangkan dikatakan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain.

Penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu secara wawancara, observasi dan dokumentasi maka sumber data disebut informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentang latar belakang penelitian, serta orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah
1	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Hulu Sungai Utara	1
2	Kepala Desa Sungai Pandan Hulu	1
3	Pegawai dikantor Desa Sungai Pandan Hulu	1
4	Petugas kebersihan Desa Sungai Pandan Hulu	4
5	Perwakilan masyarakat Desa Sungai Pandan Hulu	5

E. Desain Operasional

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian

1	2	3
VARIABEL	RUANG	INDIKATOR
Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2022: 154-158):	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	2. Sumber Daya	a. SDM/ Staf b. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Komitmen Pelaksana
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP

F. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrumen penelitian adalah suatu pekerjaan penting dalam penelitian, akan tetapi mengumpulkan data adalah jauh lebih penting. Oleh karena itu, menyusun instrumen pengumpulan data perlu dilakukan secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Untuk mendeskripsikan dunia empirik tentang masalah yang diteliti maka diperlukan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Karena itu, pengumpulan data di

lapangan dilakukan melalui teknik pengamatan dan wawancara serta dokumentasi sebagai penunjang. Pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif data yang diperlukan harus dikumpulkan/dibangkitkan terlebih dahulu.

Untuk mengumpulkan atau membangkitkan data penelitian diperlukan beberapa metode. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk membangkitkan dan mengumpulkan data di lapangan dalam rangka menjawab masalah/fokus masalah penelitian, maka dipergunakan beberapa metode/teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. Metode digunakan oleh peneliti agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran. Selain itu dengan pengamatan, peneliti akan mengalami dan melihat sendiri serta dapat mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi untuk dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat bilamana teknik komunikasi lain kurang memungkinkan.

Menurut Riyanto (Hardani, 2020:125) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan

terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (informan). Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara bergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban.

Menurut Nazir (Hardani, 2020:138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan/pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto foto, manuskrip, dan dokumen lain yang dapat menunjang. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa metode

dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (Hardani, 2020:150) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Sirajuddin Saleh, 2017:Bagian Metode Analisis Data Menurut Miles & Huberman) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Kegiatan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi:

1. Penyajian data (*data display*);
2. Reduksi data (*data reduction*);
3. Verifikasi data (*data verification*); dan
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Menurut Miles dan Huberman, pada tahapan analisis data pada penelitian kualitatif, peneliti harus mengerti terlebih dahulu tentang konsep dasar analisa data. Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dapat dilakukan semenjak peneliti sudah terjun ke lapangan. Dari analisa data dapat

diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

1. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan

data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Verifikasi Data/ Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*).

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan

dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

H. Uji Kredibilitas Data

Sugiyono (2023:365-371) Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat

memberikan deproposal penelitian data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures (Sugiyono, 2013:368). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

5. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih

mendapatkan data-data yang betentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

6. Mengadakan Member Check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2008, mei 7). *Undang-undang Republik Inonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan.sampah*. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/u>
- Anonim. (2018, Oktober 1). *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten hulu sungai utara dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga*. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/117446/perbup-kab-hulu-sungai-utara-no-74-tahun-2018.pdf>.
- Anonim. 2022. *Pedomanan Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Adminitrasi Publik* : Amuntai : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* . Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Arsyad, G., & dkk. (2024). *Bunga Rampai Ekologi*. Kendari: PT MEDIA PUSTAKA INDO.
- Gunawan, H. (2017). *Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Taman Keanekaragaman Hayati Sebuah Panduan Untuk Guru Dan Sekolah Dasar*. Subang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Hardani, S. d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

- Jusmawati, d. (2018). *Strategi Belajar Mengajar*. Makassar: Rizky Artha Mulia.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Wahyudi, Muhammad. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Desa Karangan Putih dan Kelurahan Pulau)*. (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai)
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Watampono dan Sorong: Gawe Buku.
- Yusuf, Muhamad. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur*. (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai)